

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA OLEH CAMAT MANTEWE DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Muhammad Pantarmo 18930030, Murakhman Sayuti Enggok, Iswiyati Rahayu, **Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.** Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Dari latar belakang diatas, Penulis menemukan masalah pokok diantaranya: *Pertama*, Bagaimana Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu ?, *Kedua*, Apa Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *survey*, karena berorientasi pada Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hiburan Umum di Kabupaten Tanah Bumbu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Dari hasil penelitian Pembinaan oleh camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Hal ini berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni; Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal, Bimbingan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pengarahan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pelatihan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal dan Pemberian Pedoman sudah

dilakukan secara maksimal. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Mantewe yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan Desa

Muhammad Pantarmo 18930030, Murakhman Sayuti Enggok, Iswiyati Rahayu Fostering Village Government Administration By The Head Of The High Cliffs Of The Mantewe Island The sub-district government is a level of government that has an important role in the implementation of services to the community, this is what then makes the sub-district spearhead in the implementation of general government tasks as well as part of the autonomy affairs delegated by the Regent / Mayor to be implemented in the district area. Government Regulation Number. 17 of 2018 Article 10 concerning Districts, the government assigns the Camat as the head of government to provide guidance in the administration of village governance. One form of coaching that must be carried out by the sub-district government is to provide guidance for village government administrations, because this is one of the activities that support the implementation of good village governance. From the above background, the author finds the main problems including: First, How is the Development of Village Government Administration by the Head of Mantewe Sub-District in Mantewe Islands Regency? Second, What are the Barriers to Village Government Administration Development by Mantewe Sub-District Head in Mantewe Islands Regency. The type of research used in the writing of this research is empirical legal research or survey, because it is oriented to the evaluation of the implementation of public entertainment policies in the city of Pekanbaru. This type of research is qualitative research, where qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior that is directed at the setting and the individual holistically (intact). From the results of research, guidance by the Camat of village government officials in a sub-district is needed to achieve orderly village government administration and an effective government system. This is based on the indicators used in

this study, namely; Planning has been carried out optimally, guidance has been implemented. But it has not run optimally, the briefing has been carried out. But it hasn't run optimally yet, training has been carried out. However, it has not run optimally and Guidelines have been provided optimally. The obstacles faced by the Mantewe sub- district government are the inadequate human resources of the village apparatus and the abilities that are not in accordance with the expertise in their field of work and the delay of the village government in submitting accountability reports to the sub-district.

Keywords: Development, Administration, Village Government

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Admosudirjo Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta; PT. RinekaCipta.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta. PustakaSetia
- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, 2009, *Teori Dan Praktek Pemerintahandan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Bangun Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Christensen, 2015, *Disrutive Innovation For Social Change*, Boston: HarvardBussiness Review.
- Fayol Hendry, 2013., *Pengantar Administrasi dan Fungsi-Fungsi Manajemen*. diakses tanggal 2 maret 2014.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keenam belas. Edisi Revisi Jakarta. BumiAksara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Himawan Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta; BinaIlmu.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Jakarta; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia.
- Ulum Ihyauli, 2009, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: BumiAksara.
- Kusnadi. 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang; Unibraw Press.
- Kansil, C. ST. 2004. *Pemerintahan Daerah Diindonesia*. Jakarta; SinarGrafika.
- KebanYeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Mayo, Elton, 1945. *The Social Problems Of an Industrial civization*. Boston :Harverd University.
- Nasution, 2003, *Metode Research Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta; RinekaCipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan daerah*, Jakarta; RinekaCipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta.

- Nordiawan Deddy, 2006, *Akutansi Sektor Publik*, Jakarta, SalembaEmpat
- Nurholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. W. J. S, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- R Wayne Mondy. 2008. *Manajemen sumber daya manusia*, Jilid 1 Edisisepuluh. Jakarta, Erlangga
- R. Santoso Brotodiharjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: RefikaAditama,
- Riduwan. 2009. *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*. Bandung; Alfabeta.
- Riwu. Kaho Josef. 2005, *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen, 1990, *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Perhalindo
- Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Djambatan, EdisiRevisi.
- Santoso, 1995. *Konsep Pembinaan Administrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Saydam, Gozali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta; Djambatan.
- Sedarmayati, 2004, *Good Governance (Pemerintahan yang baik)*. Bandung; Bandar Maju.
- Singarimbu, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta; LP3S
- Siagian, Sondang P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi, 1. cetakan, 17 Jakarta; Bumi Aksara.
- Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Setara Press. Jakarta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana Prenada Group.

- Sutrisno Edy, 2020, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Kencana
- Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. DKI Jakarta; Buku Obor.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan birokrasi pemerintahan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta; PT. Raja GrafindoPersada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *PenyelemggaraanOtonomi di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja GrafindoPersada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2000. *Asas-Asas Manajemen*, Bandung. Alumni.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Widodo Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Surabaya, Insan Cendekia.
- Wijaya, 2016, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung; Pustaka Setia.
- Yeremias T. Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta. Gava Media.

Jurnal

- Aprianida. 2016. Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi . Jom Fisip Vol 3. No. 2
- Fang William. et.al.2020. Govermental And Increasing FDA OversightOf Regenwative Medicine Product. JournalPre-Proof.
- Ngar Yin Mah - Daphne. 2019. Conceptualising Government – Market Dynamics In Socio – Technical Energy Trantisition. Geoforum

- Rukanova Boriana. et.al. 2020. Identifying The Value Of Data Analytics In The Context Of Government Supervision : Insights From The Customs Domain. *Government Information Quarterly*.
- Lopez Rueda Nur. et.al. 2019. Evolution And Latest Trends Of Local Government Efficiently : Worldwide Research. *Journal Of Cleaner Production*
- Wang Jiaoe. et.al. 2019. Inter – City Connections In China : High – Speed Train Vs, Inter – City Coach. *Journal Of Transport Geography*.
- Polat Abidin Zeynel. et.al. 2020. The Role Government In Land Registry And Cadastre Service In Turkey : Towards A Government 3.0 Perspective. *Land Use Policy*.
- Garcia – Gil Ramon. J. et.al. 2020. Towards A Comprehensive Understanding Of Digital Government Success : Integrating Implementation And Adoption Factors. *Government Information Quarterly*.
- You Lie.Et.Al. 2020 A Benefit Evaluation Model For Build – Up Land Use In Megacity Suburban Districts. *Land Use Policy*.
- Budi Ayuning Fitriah Nur. et.al. 2020. A Study Of Government 2.0 Implementation Indonesia. *Journal Pre- Proof*.
- Ali Omar Al.Et.Al. 2020. The Role Of Government Regulation In The Adoption Of Cloud Computing : A Case Study Of Local Government. *Scimedirect* .
- Alonso Juncal.Et.Al. 2016. Transformational Cloud Government (TTCG) : Transforming Public Administration With A Cloud Of Public Services. *Scimedirect*
- Arduini Davide.Et.Al. 2013. The Role Of Technology, Organization And Contextual Factors In The Development Of E – Government Services : An Empirical Analysis On Italian Local Public Administration. *Structural Change And Economic Dynamics*.
- Banerjee Parthasarathi. 2001. What Does It Mean To Empower Informationally The Local Government ! – Designing An Information System For A District Level Development Administration. *Information*
- Bryson J. Philip. 2008. State Administration Vs. Self – Government In The Slovak And Czech Republics. *Scimedirect*
- Houssesmand Claude. et al. 2012. How Can Coaching Make A Positive Impact Within Educational Settings ? . *Scimedirect*
- Wei Jia. Et.Al. 2020. Stakeholder Game In The Evolution And Development Of Green Buildings In China : Government Led – Perspective. *Journal Of Cleaner Production*

- Giamellaro Michael. et.al.2018. Coaching Teachers To Implement Innovations In Stem . Teaching And Teacher Education.
- Arino Casalo.V.L. .et.al.2014. Rebuilding Public Trust In Government Administrations Through E- Government Actions. Revista Espanola De Investigacion De Marketing Esic.
- Gregory Anne. 2018. UK Government Communication : The Cameron Years And Their Ongoing Legacy. Public Relation Review.
- Davies Jim. et.al. 2011. Government Information Network - Mapping Electronic Governance Cases Through Public Administration Concepts. Government Information Quarterly.
- Rattso Jorn. et.al.1995. Spending And Overspending In Local Government Administrations : A Minimum Requirement Approach Applied To Norway. European Journal Of Political Economic
- Kinder. T. 2001 Introducing An Infrastructure For Joined-Up-Government In Local Public Administration : A West Lothian Case Study. Research Policy.
- Nielen R. Sarah. et.al.2019. The Social Studies Teacher – Coach : A Quantitative Analysis Comparing Coaches And Non-Coaches Across How/What They. The Journal Of Social Studies Research.
- Li Guicai. et.al. 2019. Government – Backed `Laundering Of The Grey` In Upgrading Urban Village Properties Ningmeng Apartment Project In Shuiwei Village, Shenzhen, China. Progress In Planning.
- Tsao` Jacob. et.al. 2019. Mathematical Models Of Political Districting For More Representative Government. Computers & Industrial Engineering.
- Yusuf Muh. et.al. 2015. Stakeholders Analysis: Managing Coastal Policy Implementation In Rembang District. Sciencedirect.
- Osode Esther Oluwanbepelumi Olanubi Orioye Sijuola. 2016. Title : The Efficiency Of Government Spending On Health A Comparison Of Different Administration In Nigeria. Accepted Manuscript.
- Elidjen. et.al.2015. Evaluating The Role E – Government On Public Administration Reform : Case Of Official City Government Websites In Indonesia. Science Direct.
- Broek Vande Gertel. et.al.1995. Coaching The Coach : Intervention Effects On Need-Supportive Coaching Behavior And Athlete Motivation Andengagement. Psychology Of Sport & Exercise.
- Roe. .M. Emery. 1995. More Than The Politics Of Decentralization : Local Government Reform, District Development And Public AdministrationIn Zimbabwe.

- Surujlal J. 2015. Influence Of Outlook Toward Work On Enterpreneurial PotentialOf Professional Sport Coaches In South Africa. Science Direct.
- Sullivan Jane. et.al.2019. Examining “Best Practies” For Literacy Coaching And Monitoring : Evidence From Northern Nigeria Nd Ghana. Social Sciences & Humanities Open.
- Siegel R. Deborah. et.al.2018. Coaching Teachers To Implement Innovations In Stem. Teaching And Teacher Education
- Guan Youyi. et.al.2014. The Electronic Government Performnce Of Environmental Protection Administrations In Anhui Province, China. Technological Forecasting & Social Change
- Li Guicai. et.al.2019. Government-Backed `Laundering Of The Grey` In Upgrading Urban Village Properties Ningmeng Apartment Project In Village, Shenxhen, China
- Meirelles Paulo. et.al. 2020. Leading Successful Government-Academia Collaborations Using Floss And Agile Values. The Journal Of Systems And Software
- Wilfahrt Martha.2017.The Politics Of Locl Government Performance : Elite Cohesion Nd Cross – Village Constraints In Decentralied Senegal. WorldDevelopment

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

DaerahUndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat